

ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DESA TERINTEGRASI DI KABUPATEN SERANG

IMPLEMENTATION ANALYSIS OF INTEGRATED VILLAGE INFORMATION SYSTEMS IN SERANG DISTRICT

Arta Rusidarma Putra¹ dan Silfiana²

¹Universitas Bina Bangsa Jalan Raya Serang – Jakarta KM.03 No. 1B (Pakupatan) Serang Banten, Indonesia.

²Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Jl. Syekh Nawawi Al Bantani
KP3B Palima Serang Banten, Indonesia

Email: ¹artar.putra@gmail.com, ²silfianailhamrusidarma@gmail.com

disubmit: 15 Maret 2022, direvisi: 16 April 2022, diterima: 18 April 2022

ABSTRAK

Peran teknologi informasi telah memberikan perubahan tanpa kecuali bagi Pemerintah Desa. Penyelenggaraan pelayanan berbasis teknologi informasi menjadi suatu kewajiban dalam membangun suatu Sistem Informasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Wilayah Kabupaten Serang sebagai daerah otonomi juga diharapkan dapat mengimplementasikan sistem informasi desa. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pemetaan implementasi kebijakan sistem informasi desa yang ada di Kabupaten Serang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif data bersumber dari data sekunder dan primer analisis data menggunakan interaktif model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Sistem Informasi di Kabupaten Serang belum berjalan maksimal yang disebabkan kelemahan dalam koordinasi, aspek *resources*, *disposition* dan *bureaucratic structure*; dampak implementasi Sistem Informasi di Kabupaten Serang belum dinikmati oleh semua desa di Kabupaten Serang; dan terdapat faktor pendukung dalam implementasi Sistem Informasi diantaranya ketersediaan alokasi anggaran, pembagian tugas yang jelas masing-masing stakeholder, dan muatan Sistem Informasi Desa yang lengkap.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Sistem informasi desa, Kabupaten Serang

ABSTRACT

The role of information technology has provided changes without exception for the Village Government. The implementation of information technology-based services is an obligation in building an Information System based on Law Number 6 of 2014. The Serang Regency area as an autonomous region is also expected to be able to implement a Village Information System. This study aims to map the implementation of village information system policies in Serang Regency. The method used in this research is descriptive qualitative data sourced from secondary data and primary data analysis using an interactive model. The results showed that the implementation of Information Systems in Serang Regency had not run optimally due to weaknesses in coordination, aspects of resources, disposition and bureaucratic structure; the impact of information System Implementation in Serang Regency had not been enjoyed by all villages in Serang Regency; and there are supporting factors in Information System Implementation including the availability of budget allocations, clear division of tasks for each stakeholder, and complete Village Information System content.

Keywords: Policy Implementation, Village Information System, Serang Regency

PENDAHULUAN

Pelayanan publik saat ini menjadi sangat adaptif seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Dewasa ini, internet menjadi salah satu faktor penentu perubahan, khususnya yang berkaitan dengan derasnya arus informasi yang dapat diterima masyarakat. Teknologi informasi banyak memberikan dampak terhadap aspek sosial budaya masyarakat, melalui platform digital yang menjadi primadona bagi masyarakat untuk melakukan segala aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pula di wilayah perdesaan, kebutuhan internet menjadi bagian dari kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat Desa. Data BPS menjelaskan bahwa persentase pengguna kebutuhan internet anggota rumah tangga berusia lima tahun keatas selama 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 1. persentase pengguna kebutuhan internet anggota rumah tangga berusia lima tahun keatas

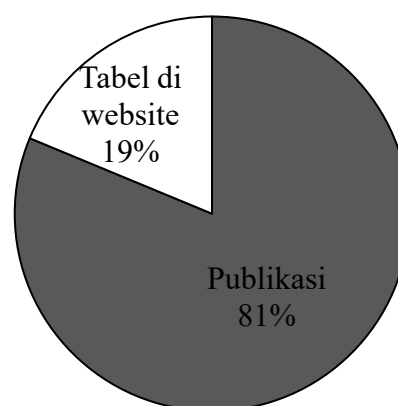
Tahun	Kriteria	Menggunakan Gadget	Akses Internet
2019	L	68,12%	45,61%
	P	64,55%	47,23%
2020	L	71,32%	51,17%
	P	61,82%	43,68%
2021	L	73,44%	54,79%
	P	63,34%	53,20%

Ket,: HP atau Komputer (PC/ Laptop/ Desktop/ Tablet)

Data Badan Pusat Statistik (BPS) di atas menunjukkan bahwa terdapat peluang dalam hal pemanfaatan Teknologi oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan data BPS yang menunjukkan persentase jumlah

perolehan data menurut jenis sumber data ditunjukkan oleh gambar 1.

Pemberian pelayanan publik dasar berada di pemerintahan desa sebagai ujung tombak pemerintahan. Pemerintah desa terus dituntut melakukan perubahan yang efektif dan efisien untuk mengembangkan tata kelola, inovasi dan kerjasama membangun kolaborasi bersama *stakeholder* dan sinergitas dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk mewujudkan *E-government*.



Gambar 1. Persentase Jumlah Perolehan Data menurut Jenis Sumber Data

Dengan adanya sistem pelayanan berbasis elektronik diharapkan memberikan kemudahan dalam pemberian pelayanan publik secara cepat, akurat, adil, dan transparan. Berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa diberikan otonomi dalam mengatur dan mengelola pemerintahan. Artinya Pemerintah Desa diberikan kewenangan untuk membuat akselerasi pembangunan di setiap desa berdasarkan atas asas

kebersamaan, gotong-royong, kemandirian, dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan.

Komunikasi dan informasi telah menjadi suatu bagian dari pelayanan data, informasi serta dapat membantu pelayanan publik dengan konsep digitalisasi. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor.22 Tahun 2015 dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 melalui sembilan program prioritas Nawacita ketiga membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan melalui Kebijakan Kementerian Keuangan dan Kemendes PDTT Nomor.19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat.

Tanggung jawab pelaksanaan tersebut berada dibawah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfoantik) yang bekerjasama dengan pihak ketiga dalam hal ini adalah PT. Digital Desa (PT. DIGIDES). Adapun tanggung jawab dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) adalah mengkoordinasikan pengembangan, penerapan dan pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID) di tingkat desa, membina pengelola Sistem Informasi Desa

(SID) di tingkat desa, menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) penerapan Sistem Informasi Desa (SID), dan memberikan informasi kepada desa melalui Sistem Informasi Desa (SID).

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfoantik) sebagai pelaksana teknis bertanggung jawab untuk mengembangkan Sistem Informasi Desa (SID) dan sistem informasi pembangunan kawasan perdesaan, mengembangkan jaringan internet secara merata, mengintegrasikan Sistem Informasi Desa (SID) dengan sistem informasi yang ada di tingkat Kabupaten, serta mengelola sistem informasi dan teknologi informasi untuk mendukung dan memfasilitasi Sistem Informasi Desa (SID) di tingkat desa.

Sejak diberlakukannya kebijakan Sistem Informasi Desa (SID), terdapat 39 desa yang sudah memiliki sistem informasi desa dari 326 desa yang ada di Kabupaten Serang. Hal ini disebabkan karena tidak semua pemerintah desa menganggarkan Sistem Informasi Desa (SID) dalam APBDes masing-masing desa. Adapun desa yang memiliki *website* namun dengan domain *website* yang berbeda-beda. Padahal seharusnya dalam Sistem Informasi Desa ini diharapkan mempunyai domain *website* “*desa.id*” agar selaras dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015

tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara.

Tujuan khusus penelitian ini adalah mengidentifikasi pelaksanaan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Serang yang telah melaksanakan dan belum melaksanakan Sistem Informasi Desa, membuat Model Implementasi Sistem Informasi Desa di Kabupaten Serang dengan menyesuaikan konteks kebijakan dan lingkungan implementasi kebijakan.

Urgensi penelitian ini adalah menemukan Model Implementasi Sistem Informasi Desa di Kabupaten Serang dalam meningkatkan kualitas pengelolaan data desa yang akurat dan berkala, memperluas jangkauan informasi, meningkatkan kualitas pelayanan administrasi desa, mempermudah akses informasi serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan desa. Beberapa Penelitian terdahulu yang ditampilkan pada bagian ini bertujuan untuk membandingkan penelitian yang akan dilakukan dengan sejumlah penelitian telah dilaksanakan oleh peneliti lain atau pihak lain.

Hal-hal yang ditekankan pada penelitian terdahulu, meliputi konsep yang digunakan, pendekatan dan metode penelitian, hasil penelitian dan relevansinya dengan penelitian yang akan dilakukan. Menurut Müller & Skau (2015) upaya digitalisasi dalam sektor publik dimulai lebih dari dua dekade yang lalu, organisasi

masih berjuang untuk mengimplementasikan layanan *E-government*, dan sebagian besar inisiatif berakhir dengan kegagalan. Karena layanan *E-government* telah berkembang dan menjadi lebih komprehensif, tantangan penerapannya juga semakin luas. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran literatur *E-government* dan mengidentifikasi faktor-faktor kesuksesan digitalisasi pada berbagai tahap kedewasaan *E-government* menggunakan model pengembangan *E-government* yang disintesis (Lester & Stewart, 2000).

Enam kategori faktor keberhasilan diidentifikasi di semua tingkat kematangan, termasuk lingkungan eksternal, organisasi, manajemen, karyawan, warga negara, dan teknologi. Menurut Fitri dan Nugroho (2017) dengan terbangunnya aplikasi *Electronic Government* untuk pemberdayaan pemerintahan dan potensi desa berbasis IT maka terbentuk suatu *database* pemerintahan, potensi desa dan data pendukung peluang investasi yang datanya bersumber langsung dari beberapa desa/kelurahan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan implementasi *e-government* dalam Sistem Informasi Desa yang tidak hanya dari segi potensi desa dan peluang investasi saja, namun juga terintegrasi dengan pemerintah daerah/pusat guna mengawal transparansi dan

akuntabilitas desa. Pada penelitian terdahulu indikator penelitiannya hanya pada potensi desa serta data pendukung peluang investasi saja, sedangkan dalam penelitian ini indikator pengembangan *E-Government* lebih lengkap (data desa, kependudukan, dll, serta sebagai media yang digunakan dalam pelayanan administrasi) (Korten, 1993; Taufiq dkk., 2019).

Pada penelitian terdahulu fokus utamanya yaitu pada proses pembuatan sistem sementara pada penelitian ini fokus kepada proses implementasi penerapan SID. Menurut Fitri dkk. (2015) arsitektur sistem administrasi pelayanan masyarakat yang terstruktur dapat dikelola oleh sistem ini dan memungkinkan data digunakan bersama dalam sistem. Komponen utama dari sistem ini adalah: (1) komponen administratif, (2) komponen Badan Permusyawaratan Desa, (3) Komponen Sekretaris Desa, (4) komponen Ketua RW, serta (5) Pelaksana Teknis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi *E-Government* dalam Sistem Informasi Desa. Penelitian sebelumnya fokus pada upaya menghasilkan sebuah sistem pendukung administrasi berbasis teknologi informasi sedangkan penelitian ini mengkaji tentang bagaimana implementasi Sistem Informasi Desa di desa berbasis *E-Government*.

Penerapan konsep *E-Government* dinilai berhasil, namun pada prosesnya konsep tersebut tidak dapat dikembangkan

dengan baik karena minimnya sumber daya manusia profesional pada bidang informasi dan teknologi, dan minimnya anggaran operasional untuk program tersebut (Sulismadi dkk., 2017). Perbedaan kajian terletak pada lingkup subjek penelitian, dimana penelitian sebelumnya subjek penelitiannya adalah pemerintahan desa, sedangkan penelitian ini subjeknya adalah implementor (DPMD & Diskominfosantik) dan pemerintahan desa.

Berdasarkan penelitian perbandingan di atas, diperoleh perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji. Dari beberapa perbandingan tersebut, diantara keistimewaan penelitian ini yakni: pengembangan *E-Government* yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 86 ayat (4) tentang Sistem Informasi Desa pada ayat (2) yang meliputi data Desa, Kawasan Perdesaan serta informasi lain yang terkait dengan pembangunan Desa, dan pembangunan Kawasan Perdesaan sehingga memungkinkan seluruh Desa yang ada di Kabupaten Serang untuk menerapkan Sistem Informasi Desa (SID) ini.

Indikator dari Sistem Informasi Desa (SID) ini lebih lengkap dibandingkan dengan penelitian sebelumnya (data desa dan data kebutuhan lainnya sesuai dengan perundang-undangan, media publikasi, media interaksi dan komunikasi serta media pelayanan administrasi). Program Sistem

Informasi Desa (SID) ini juga memiliki beberapa aplikasi diantaranya Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang terintegrasi dengan pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Desa.

Sistem Informasi Desa diperlukan dalam mendukung program Pemerintah pusat menuju era digitalisasi di seluruh sektor. Termasuk pelayanan sektor publik pada tingkat perdesaan. Internet di wilayah perdesaan kini memasuki era digitalisasi, dimana informasi yang berkembang dari internet bisa diakses langsung oleh masyarakat pedesaan.

Menurut Wilhem Wau (dalam Sulistyowati & Dibyorin, 2013) menerangkan bahwa Sistem Informasi Desa (SID) merupakan informasi yang diimplementasikan dengan perangkat teknologi informasi dan aplikasi perangkat lunak yang dioperasikan oleh perangkat Desa. Sistem informasi ini berbasis komputer dan *web* sehingga seluruh informasi dapat diakses oleh masyarakat. Lisensi SID dikembangkan dalam platform sistem perangkat lunak bebas dan terbuka (*free and open source software*) yang berarti dapat digunakan, disalin, didistribusikan, ditingkatkan kinerjanya, dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan hal tersebut SID dirancang guna menyajikan informasi dan dapat membantu pelayanan sektor publik. Salah satu yang dapat

diimplementasikan, yakni pelayanan kependudukan.

Hidayatulloh, dkk., (2015) menyebutkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan berbasis *web (online)* atau dikenal pula dengan istilah *E-service* adalah suatu terobosan dalam peningkatan kepuasan masyarakat akan kinerja pemerintah desa dan optimalisasi teknologi di bidang informasi dan komunikasi dimana dengan pemanfaatan teknologi ini masyarakat dapat dilayani kapanpun dan dimanapun. Hal ini yang menjadi menarik tentang implementasi dari sistem informasi desa yang dapat menjangkau masyarakat desa.

Sistem informasi desa itu sendiri merupakan adopsi dari implementasi *E-Government*. Pascual (dalam Sutanta, dkk., 2012) menyatakan *E-Government* adalah penggunaan teknologi informasi (IT) yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan bisnis, didalamnya dengan melibatkan otomatisasi dan komputerisasi pada prosedur *paper-based* yang dapat mendorong cara baru dalam kepemimpinan, mendiskusikan dan menetapkan strategi, transaksi bisnis, mendengarkan warga dan komunitas, serta mengorganisasi dan menyampaikan informasi. Oleh karena itu dalam sistem informasi desa juga dapat dimanfaatkan untuk mendengarkan keinginan, masukan maupun keluhan dari masyarakat desa.

Meskipun demikian terdapat berbagai kelemahan dalam sistem informasi desa, diantaranya memungkinkan adanya kesalahan, membutuhkan waktu yang lama dalam proses pencarian data, maupun dalam proses pembuatan laporan (Priyanti, 2013). Kelemahan dalam sistem tersebut tentunya harus diperbaiki dan diatasi dalam perbaikan sistem. Sistem yang baik tentunya menghasilkan data yang baik pula. Sistem informasi di Desa dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan Henry. C Lucas (dalam Astuti, 2011) yang menyatakan bahwa sistem Informasi merupakan suatu kegiatan dari berbagai prosedur yang diorganisasikan, bilamana dieksekusi akan menyediakan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian di dalam suatu organisasi. Oleh sebab itu, sistem informasi desa dapat bermanfaat sebagai alat pengendali dan dapat dijadikan dasar sebagai pembuatan maupun pengambilan keputusan dalam suatu organisasi publik.

Peningkatan sektor pelayanan publik harus terus ditingkatkan. Salah satu ukuran keberhasilan peningkatan pelayanan publik ini adalah kemudahan publik dalam mendapatkan segala informasi dengan memanfaatkan sistem informasi digital. Lukman (2000) menyatakan, bahwa Pelayanan merupakan suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung dengan seseorang orang lain atau

mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan. Pelayanan yang dimaksud tentunya berorientasi pada masyarakat sebagai penerima layanan. Pelayanan publik harus menjadi prioritas bagi sebuah instansi pemerintahan dalam menjalankan tugasnya guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan sebuah pelayanan.

Salah satu Pelayanan publik yang berkembang saat ini adalah pelayanan berbasis *website*. Nandari, dan Sukadi (2014) mengatakan bahwa dengan menggunakan *website* data yang diolah bisa lebih mudah dan praktis dibandingkan dengan sistem yang mana data yang diolah sering kali mengalami kesulitan. Dengan kata lain, pelayanan publik saat ini telah bertransformasi ke pelayanan digital atau daring.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Serang Provinsi Banten, dengan melibatkan beberapa desa sebagai objek penelitian yang menyelenggarakan Sistem Informasi Desa Di Kabupaten Serang serta melibatkan organisasi perangkat daerah dan swasta terdiri dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfoantik) bekerjasama dengan pihak ketiga dalam hal ini adalah PT. Digital Desa (PT. DIGIDES). Dari data yang

didapatkan lalu dilakukan analisa dan dikembangkan Model Implementasi Sistem Informasi desa di Kabupaten Serang dengan melakukan identifikasi data dan informasi Sistem Informasi Desa yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Sugiyono, 2010). Pada penelitian ini hasil atau luaran penelitian yaitu Identifikasi data dan informasi pelaksanaan Sistem informasi Desa Kabupaten Serang. Data dan Informasi tersebut berupa dokumen Peraturan Bupati, Peraturan Desa, Keputusan Desa, Rencana Kegiatan Anggaran, APBDes dan Penetapan Prioritas Kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Sistem Informasi Desa Terintegrasi

Sistem Informasi Desa adalah proses dan Penerapan Tata Kelola yang berbasis komputer, mengelola informasi kantor desa dalam mendorong fungsi dan tugas pemerintah desa termasuk pengelolaan aset, perencanaan, dana desa dan pelayanan publik. Sedangkan peran dan manfaat dari sistem informasi desa adalah kantor desa bisa lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, pelayanan prima dan warga dapat mengakses informasi desa.

Menurut muatannya sistem informasi desa (SID) terdiri dari:

1. Data desa (data potensi desa, pendidikan, kesehatan, kependudukan, kemiskinan, pembangunan desa, pembangunan kawasan perdesaan, keuangan, ekonomi, sosial budaya, pemerintahan desa, dan data lain sesuai kebutuhan);
2. Informasi yang dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. media komunikasi antara Pemerintah Desa dan masyarakat; dan
4. layanan administrasi desa; dan Informasi lain yang berkaitan dengan pemerintahan, pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan.

Kebijakan sistem informasi desa pemerintah daerah kabupaten Serang berada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfosantik). Kedua dinas tersebut bertugas melakukan koordinasi dan pengembangan sistem informasi desa meliputi pengembangan perangkat keras yang mencakup komputer server, jaringan internet, sistem operasi server, dan pengembangan sumber daya manusia yang mencakup administrator di tingkat kabupaten dan tenaga ahli.

Ditinjau dari sumberdaya kebijakan dalam rangka memperlancar administrasi dalam mengimplementasikan program SID,

Implementor tidak mengupdate kebijakan. Selanjutnya Pihak ketiga sebagai fasilitator dalam hal ini adalah PT. Digital Desa (PT. DIGIDES) sebagai pembuatan *website* yang terhubung dengan *desa.id* dan pendampingan dan pelatihan bagi aparatur desa dalam mengelolah sistem informasi desa. Pelaksanaan sistem informasi desa di kabupaten Serang belum berjalan optimal dikarenakan komunikasi yang dijalankan implementor kurang intens dimana tidak ada rapat koordinasi lanjutan membahas perkembangan program SID. Kelompok sasaran dalam hal ini Pemerintah Desa mengalami kesulitan dalam melakukan komunikasi dengan pihak ketiga (PT. DIGIDES).

Dampak dari Implementasi Sistem Informasi Desa

Hak dari Pemerintah Desa yaitu mendapatkan informasi (rencana kerja pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, rencana dana desa, bagian bagi hasil pajak dan retribusi daerah untuk desa serta bantuan keuangan yang bersumber dari APBD). Melalui Sistem Informasi Desa, Pemerintah Daerah diharapkan mendapatkan pembinaan, memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk pengembangan Sistem Informasi Desa mengangkat dan memberhentikan pengelola Sistem Informasi Desa di tingkat desa dan menolak memberikan informasi.

Pemerintah Desa berkewajiban mengelola dan menyebarluaskan Sistem Informasi Desa; menyediakan dan memelihara perangkat Sistem Informasi Desa menyediakan, memberikan atau menerbitkan informasi secara berkala/tersedia setiap saat yang akurat; meningkatkan kemampuan pengelola Sistem Informasi Desa dan Meningkatkan kualitas pengelolaan Sistem Informasi Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan data sistem informasi desa yang telah dihimpun, yakni terdapat 39 desa yang sudah memiliki sistem informasi desa dari 326 desa yang ada di Kabupaten Serang. Hal ini menunjukkan bahwa hanya 11,7% (persen) desa yang sudah memiliki sistem informasi desa dan terintegrasi karena sebagian Pemerintah Desa belum memprioritaskan program sistem informasi desa di anggaran pendapatan dan belanja desa. Sistem informasi desa yang dimiliki desa-desa tersebut terdiri dari *website* Pemerintahan Desa dengan *domain.id* dan juga yang masih berupa *web-blog*.

Data desa yang telah mempunyai *website* maupun *web-blog* di Kabupaten Serang ditunjukkan oleh Tabel 2. Sedangkan untuk pemberian *website* dengan domain “*desa.id*” oleh pihak fasilitator belum ada yang direalisasikan. *Website* merupakan media yang dijadikan oleh sebuah organisasi untuk menampilkan identitas diri dalam

melakukan promosi, isi dari *website* bisa berisi data-data terkait potensi sumberdaya yang dimiliki suatu organisasi yang menggambarkan tujuan dari sebuah organisasi. Konektivitas jangkauan yang luas serta bisa diakses 24 jam penuh membuka peluang bagi sebuah organisasi untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak, baik itu kerjasama dalam sektor pertanian, perkebunan, perikanan, bahkan produk lokal sesuai dengan potensi yang dimiliki organisasi yang dimaksud.

Tabel. 2 Desa yang Memiliki *Website* di Kabupaten Serang

No	Kecamatan	Desa	No	Kecamatan	Desa
1	Anyer	Anyer	20	Kibin	Nombo Ilir
2	Anyer	Tambak Ayam	21	Kopo	Babakanjaya
3	Baros	Baros	22	Kragilan	Kragilan
4	Baros	Curug Agung	23	Kramatwatu	Serdang
5	Binuang	Binuang	24	Kramatwatu	Harjatani
6	Bojonegara	Lambang Sari	25	Lebak Wangi	Lebak Kepuh
7	Carenang	Carenang	26	Lebak Wangi	Pagandikan
8	Cikande	Cikande	27	Lebak Wangi	Tirem
9	Cikeusal	Sukamaju	28	Mancak	Angsana
10	Cikeusal	Sukaraja	29	Mancak	Bale Kencana
11	Cinangka	Cinangka	30	Mancak	Labuan
12	Ciruas	Ciruas	31	Mancak	Mancak
13	Gunung Sari	Gunung Sari	32	Mancak	Sangiang
14	Jawilan	Jawilan	33	Mancak	Talaga
15	Pabuaran	Pabuaran	34	Mancak	Waringin
16	Padarincang	Cibinong	35	Pamarayan	Pamarayan
17	Tirtayasa	Tirtayasa	36	Petir	Padasuka
18	Tirtayasa	Puser	37	Petir	Petir
19	Kibin	Barengkok	38	Waringin	Cokopsulanjana
			39	Tirtayasa	Laban

Sumber: Data Penelitian, 2022.

Faktor pendukung Implementasi Sistem Informasi Desa

Pentingnya *website* bagi organisasi pemerintahan desa diharapkan mampu menunjang segala aktivitas yang ada di pemerintahan desa (Praditya, 2014). *Website*

bisa dijadikan sebagai media penyimpanan dan pengelolaan data secara permanen, *website* juga bisa dijadikan sebagai media komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat, *website* juga bisa digunakan sebagai media layanan administrasi secara *online* yang akan memudahkan masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan akan administrasi, bahkan *website* bisa dijadikan sebagai sarana yang mendukung pengelolaan keuangan desa dalam mewujudkan transparansi yang akan meningkatkan kepercayaan publik (Nabilah, 2017; Ridha, 2018). Faktanya hingga sekarang semua desa yang ada di Kabupaten Serang belum memperoleh *website* dengan domain “desa.id” sebagaimana yang tercantum dalam kesepakatan kontrak kerja antara pemerintah desa dengan pihak fasilitator. Namun ada beberapa desa yang telah memiliki *website* hasil dari kemandirian serta swadaya masyarakat setempat bahkan sebelum hadirnya kebijakan Sistem Informasi Desa (SID) di Kabupaten Serang.

Adapun desa yang telah memiliki *website* diantaranya: Desa Anyer, Tambak ayam, Baros, Curug Agung, Binuang, Lambangsari, Carenang, Cikande, Sukamaju, Sukaraja, Cinangka, Ciruas, Gunungsari, Jawilan, Pabuaran, Cibinong, Tirtayasa, Puser, Barengkok, Nombo Ilir, Babakanjaya, Kragilan, Serdang, Lebak Kepuh, Pagandikan, Tirem, Angsana, Bale

Kencana, Labuan, Mancak, Sangiang, Talaga, Waringin, Pamarayan, Padasuka, Petir, Seuat Jaya meskipun dengan domain *website* yang berbeda-beda yaitu: .com, blogspot.com, business.site, sideka.id, wordpress.com, dan kemendes.go.id.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Implementasi Sistem Informasi di Kabupaten Serang belum berjalan secara maksimal yang disebabkan kelemahan dalam koordinasi, aspek *resources*, *disposition* dan *bureaucratic structure*.

Dampak dari Implementasi Sistem Informasi di Kabupaten Serang adalah adanya pelayanan administrasi lebih efektif dan efisien, meningkatkan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. belum dinikmati oleh semua desa di Kabupaten Serang.

Dalam Implementasi Sistem Informasi di Kabupaten Serang terdapat faktor pendukung yaitu, tersedianya alokasi anggaran untuk mendukung implementasi Sistem Informasi Desa, terdapat pembagian tugas yang jelas masing-masing *stakeholder*, dan muatan Sistem Informasi Desa yang lengkap.

Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat diberikan untuk implementasi Sistem Informasi Desa

Terintegrasi di Kabupaten Serang adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten harus membentuk Forum Data ditingkat kabupaten sebagai media untuk membangun kesepahaman antar multistakeholder sesuai kewenangannya untuk menjalankan Sistem Informasi Desa dengan baik;
2. Pemerintah Desa hendaknya menjadikan Sistem Informasi Desa sebagai kebutuhan dalam pemenuhan data dalam pelaksanaan pembangunan di Desa;
3. Sistem Informasi Desa hendaknya digunakan sebagai media untuk mewujudkan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas publik, sehingga seluruh informasi yang terdapat dalam Sistem Informasi Desa Terpadu harus selalu diperbaharui dan dilengkapi untuk pemenuhan kelengkapan data pada ruang publik; dan
4. Sistem Informasi Desa Terpadu hendaknya dimanfaatkan untuk penguatan ekonomi masyarakat dengan memaksimalkan sumber daya yang ada di Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, P. D. (2011). Sistem Informasi Penjualan Obat Pada Apotek Jati Parma Arjosari, *J. Speed - Sentral Penelitian Engineering dan Edukasi*. 3(4): 34 – 39.
- Priyanti, D. (2013). Sistem Informasi Data Penduduk Pada Desa Bogoharjo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan. *IJNS - Indonesian Journal on*

- Networking and Security*, 2(4): 55 – 61.
- Fitri, R., & Nugroho, A. S. B. (2017). Pengembangan Sistem Informasi Desa Untuk Menuju Tata Kelola Desa Yang Baik (Good Governance) Berbasis TIK. *Jurnal Positif*, 3(2): 99 – 105.
- Fitri, T. A., Nasution, T., & Herwin, H. (2015). Pengembangan model pelayanan kantor desa terhadap masyarakat berbasis mobile computing. *JEPIN (Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika)*, 1(2): 116 – 121.
- Kominfo. (2017). *Survei Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi: Serta Implikasinya Terhadap Aspek Sosial Budaya Masyarakat*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik, Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Jakarta: ii + 51.
- Korten, D. C. (1993). Menuju Abad ke-21. Yayasan Obor Indonesia.
- Lester, J. P., & Stewart, J. (2000). *Public Policy: An Evolutionary Approach* Wadsworth Australia publ., Wadsworth: xvi + 272.
- Müller, S. D., & Skau, S. A. (2015). Success factors influencing implementation of egovernment at different stages of maturity: a literature review. *International Journal of Electronic Governance*, 7(2): 136 – 170.
- Nabilah, A. (2017). Penerapan website desa dalam meningkatkan pelayanan masyarakat Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang. *Publika*, 5(1): 1 – 6.
- Nandari, B. A., & Sukadi. (2014). Pembuatan Website Portal Berita Desa Jetis Lor. *Indonesian Journal on Networking and Security*, 3(3): 43 – 47.
- Praditya, D. (2014). Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di tingkat pemerintahan desa. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 17(2): 129 – 140.
- Putra, A. R., & Silfiana, S. (2019). Development Strategy Of Potential Village To Be Village Of Education Tourism In Bumi Jaya Village (Case Study of Bumi Jaya Pottery Craft Center in Ciruas District, Serang Regency). *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 3(1): 13 – 32. <https://doi.org/10.37950/jkpd.v3i1.51>
- Sugiyono, S. (2010). Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D. Alfabeta, Bandung.
- Sulismadi, S., Wahyudi, W., & Muslimin, M. (2017). Model Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Menjalankan Fungsi Pemerintahan Berbasis Electronic Government (E-Government) menuju Pembangunan Desa Berdaya Saing. *ARISTO*, 5(2): 216 – 258. <https://doi.org/10.24269/aristo.v/2.2016.2>
- Sulistyowati, F., & Dibyorin, C. R. (2013). Partisipasi Warga terhadap Sistem Informasi Desa. *Jurnal ASPIKOM*, 2(1): 579 – 588. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v2i1.34>
- Sutanta, E., & Ashari, A. (2012). Pemanfaatan Database Kependudukan Terdistribusi Pada Ragam Aplikasi Sistem Informasi Di Pemerintah Kabupaten/Kota. *Jurnal Sistem Informasi & Teknologi Informasi (SISFOTENIKA)*, STMIK Pontianak, Kalimantan Barat, 2(1): 11 – 20.
- Hidayatulloh, C. M. (2015). Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan Desa Candigatak Berbasis Web *Jurnal IT CIDA (2015)*, 1(1), 42 – 55.